

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program transformasi dari koperasi desa, yang menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 ini membahas tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan mengarahkan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintahan desa untuk melakukan percepatan pembentukan koperasi desa sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian nasional (Humas Kemensetneg RI, 2025).

Secara substansial, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 ini menegaskan bahwa koperasi tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang mencakup penyediaan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, fasilitas pergudangan (*including cold storage*), logistik desa, layanan kesehatan dasar seperti apotek atau klinik, serta mekanisme penyerapan produk pertanian lokal. Model kelembagaan koperasi seperti ini diharapkan dapat membantu dalam memperpendek rantai distribusi, meningkatkan pendapatan petani, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pekerja informal desa (Haryono, 2025). Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) mengamanatkan percepatan pembentukan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan melalui langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025).

Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tersebut merespons kondisi riil kelembagaan ekonomi desa di Indonesia yang masih belum optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai penggerak utama perekonomian, tetapi juga oleh peranan lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi dalam mengembangkan kegiatan usaha. Lemahnya kelembagaan ekonomi di tingkat desa, termasuk ketiadaan atau tidak berfungsinya koperasi desa, menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan ekonomi dan merugikan masyarakat desa (Marit, et al., 2021). Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Cileunyi Wetan, data Badan Pusat Statistik melalui publikasi Kecamatan Cileunyi Dalam Angka Tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak terdapat data maupun keterangan mengenai keberadaan Koperasi Unit Desa di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024).

Tabel 2.2.1.1 Data Keberadaan Koperasi Unit Desa di Kecamatan Cileunyi

Desa/Kelurahan	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)
Cibiru Hilir	-	-
Cinunuk	-	-
Cimekar	-	-
Cileunyi Kulon	-	2
Cileunyi Wetan	-	-
Cibiru Wetan	-	-
Kecamatan Cileunyi	-	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (2024)

Tabel 2.2.1.2 Data Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Cileunyi

Desa/Kelurahan	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	Koperasi lainnya
Cibiru Hilir	-	-
Cinunuk	15	-
Cimekar	1	-
Cileunyi Kulon	2	-
Cileunyi Wetan	2	-
Cibiru Wetan	-	-
Kecamatan Cileunyi	20	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (2024)

Meskipun demikian, data Potensi Desa (Podes) mencatat adanya dua unit koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Desa Cileunyi Wetan. Keberadaan koperasi simpan pinjam tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis kelembagaan koperasi telah hadir, namun masih terbatas pada aspek simpan dan pinjam, sehingga belum mencakup pengelolaan sektor-sektor ekonomi lain yang lebih luas dan komprehensif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024). Kondisi inilah yang menjadi salah satu latar belakang perlunya pembentukan kelembagaan koperasi desa yang lebih terintegrasi di Cileunyi Wetan sebagai bagian dari implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan merupakan realisasi kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan dilandasi upaya strategis pemerintah desa dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis partisipasi dan potensi lokal. Dalam rangka merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah desa Cileunyi Wetan menyelenggarakan musyawarah desa pada tanggal 17 April 2025 yang melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, serta perwakilan masyarakat setempat, sebagai wujud proses perencanaan yang partisipatif dan inklusif (Nurendi, Sejarah Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan, 2026). Pasca musyawarah desa, dilakukan proses penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembentukan kepengurusan, serta pengurusan legalitas dan akta notaris koperasi sebagai syarat administratif sebelum koperasi dapat beroperasi secara resmi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Langkah konkret pemerintah desa ini kemudian diikuti dengan serangkaian proses administratif dan legal yang menjadi fondasi keabsahan koperasi sebagai lembaga ekonomi resmi. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan diresmikan secara nasional pada 21 Juli 2025 melalui konferensi virtual oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian ini menjadi tonggak penting yang menandai legalitas sekaligus pengakuan negara terhadap keberadaan koperasi desa sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Selain itu, peresmian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi berbasis kolektivitas dan prinsip gotong royong. Kegiatan peresmian ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh serta seluruh pihak terkait yang berperan aktif dalam mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Pasca peresmian, KDMP Cileunyi Wetan mulai mengoperasikan sejumlah sektor usaha strategis sebagai wujud nyata dari mandat

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk menjadikan koperasi desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. (Ardiansyah, 2025).

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan mengembangkan dan mengelola berbagai sektor usaha strategis yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sektor usaha yang dijalankan meliputi bidang perdagangan melalui pengelolaan retail sembako, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial, serta penyediaan layanan keuangan dan sistem distribusi barang guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di tingkat desa. Pengelolaan berbagai sektor usaha tersebut dilaksanakan secara profesional dan terintegrasi dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar koperasi, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, sehingga seluruh aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan partisipasi, kemandirian, serta kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara keseluruhan (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, 2025).

Sejalan dengan kondisi tersebut, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan dalam praktik operasionalnya tidak sepenuhnya dimulai dari kondisi tanpa basis kelembagaan, melainkan merupakan kelanjutan dari aktivitas koperasi yang telah lebih dahulu berkembang di Desa Cileunyi Wetan, khususnya koperasi simpan pinjam yang telah beroperasi sebelumnya. Dalam proses pengembangannya, KDMP Cileunyi Wetan memperoleh dukungan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Citra Mandiri Jawa Barat, yang berperan dalam

penguatan aspek kelembagaan, manajerial, serta pengembangan usaha (Redaksi, 2026). Dukungan tersebut berkontribusi terhadap perkembangan KDMP Cileunyi Wetan yang menunjukkan kinerja relatif baik, sehingga koperasi ini tidak hanya mampu mengelola berbagai sektor usaha secara lebih komprehensif, tetapi juga menjadi salah satu contoh pengembangan KDMP yang dinilai berhasil dan dijadikan percontohan bagi KDMP di wilayah lain (Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, 2025). Meskipun demikian, perkembangan positif tersebut tidak berarti bahwa KDMP Cileunyi Wetan telah terbebas dari berbagai tantangan. Suherlan (2024) dalam studinya tentang transformasi kelembagaan koperasi di Kabupaten Cianjur menemukan bahwa koperasi yang relatif baru senantiasa menghadapi tantangan dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus dan anggota, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta kebutuhan pendampingan yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Tantangan-tantangan tersebut juga relevan dalam konteks KDMP Cileunyi Wetan sebagai koperasi yang sedang dalam proses penguatan kelembagaan. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada perubahan nyata di lapangan (Suherlan, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai peran dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan sebagai bentuk transformasi kelembagaan koperasi desa yang berkembang dari koperasi simpan pinjam yang telah ada sebelumnya, di tengah ketiadaan Koperasi Unit Desa di wilayah tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya memfokuskan

kajian pada koperasi simpan pinjam atau KUD sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bersifat sektoral, penelitian ini secara khusus menelaah pengembangan KDMP Cileunyi Wetan sebagai model kelembagaan koperasi desa yang bersifat multisektor dan terintegrasi, meliputi sektor perdagangan melalui penyediaan sembako, layanan simpan pinjam, sistem logistik dan distribusi, serta penguatan sektor pertanian. Selain itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian empiris yang membahas pengembangan koperasi desa sebagai kelembagaan ekonomi yang bersifat multisektor dan terintegrasi, khususnya dalam konteks implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi desa.

Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya kajian mendalam dengan judul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sistem Koperasi Desa Merah Putih (*Participatory Action Research* di Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung)".

1.2 Fokus Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian, fokus penelitian ini diarahkan pada pengelolaan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Sebagai upaya memperjelas arah penelitian, disusun pertanyaan penelitian yang relevan dengan fokus kajian:

1. Bagaimana proses peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilakukan oleh Cileunyi Wetan?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai moral dalam proses pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan?

3. Bagaimana partisipasi antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, perumusan tujuan sejak awal sangat penting agar prosesnya tetap terarah dan terhindar dari potensi penyimpangan. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilakukan oleh Desa Cileunyi Wetan.
2. Menganalisis penerapan nilai-nilai moral dalam proses pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.
3. Menganalisis partisipasi antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara akademis (kebermanfaatan teoritis), maupun dalam penerapannya (kebermanfaatan praktis), yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam melalui pengayaan beberapa mata kuliah yang relevan. Pada mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, penelitian ini memperaya kajian praktik ekonomi berbasis keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan umat. Pada mata kuliah Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Umat, penelitian ini memberikan perspektif pengembangan usaha kolektif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi desa. Selain itu, pada mata kuliah Akuntansi Mikro, penelitian ini memberikan gambaran pengelolaan keuangan koperasi skala desa yang sederhana dan akuntabel. Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait penerapan metode *Participatory Action Research* (PAR) serta menjadi referensi ilmiah mengenai pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai sistem ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program pendukung koperasi desa. Bagi masyarakat Desa Cileunyi Wetan, penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan partisipasi dan pemanfaatan koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan praktis dalam penerapan pendekatan *Participatory*

Action Research (PAR) untuk penguatan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

1.5 Landasan Pemikiran

Tinjauan pustaka ini mengkaji berbagai konsep tentang pemberdayaan ekonomi melalui koperasi sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

1.5.1 Landasan Teoritis

Landasan teoritis ini disusun untuk memberikan dasar konsep dan kerangka pemikiran yang mendukung penelitian, khususnya mengenai pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, sehingga memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

a. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakkan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat (Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi, 2014). Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan roda perekonomian (Baswir, 1993) (Awang, Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan, 2014).

Ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil (Awang, Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan, 2014). Ekonomi kerakyatan bukan konsep baru, melainkan konsep lama dari Ekonomi Pancasila. Namun, lebih ditekankan pada sila ke-4 yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Inilah asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang oleh Sidang Tahunan (ST) MPR 2002 dijadikan ayat 4 baru (Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi, 2014).

Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi (Baswir, Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesia, 2014).

Salah satu substansi sistem ekonomi kerakyatan adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional dan turut

menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar (Awang, Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan, 2014).

b. Koperasi

Sejak awal koperasi dimengerti sebagai sekumpulan orang yang melakukan usaha bersama. Koperasi sebagai usaha otonom yang dibangun secara sukarela sekelompok orang dengan tujuan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kepemilikannya bersama dan dikendalikan secara demokratis (Sinaga, 2014). Koperasi sebagai soko guru perekonomian, dilihat dari sudut UUD Pasal 33 Tahun 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan (Awang, Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan, 2014).

Sistem ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi ini dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Koperasi adalah contoh bangun perusahaan yang sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan dan tertuang dalam konstitusi bangsa, yaitu "azas kekeluargaan" dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Suma, Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Agama Islam, 2014).

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945) (Republik Indonesia, 1945).

Partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi amatlah penting. Keberhasilan partisipasi ditentukan oleh kesesuaian kebutuhan antaranggota, program, serta manajemen koperasi. Anggota juga memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritik membangun untuk kemajuan koperasi. Hal inilah yang sering dilalaikan banyak koperasi dalam praktiknya (Mustasowifin, 2014).

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran penelitian dalam menganalisis pengelolaan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Kerangka ini menghubungkan landasan teoritis dengan relitas empiris di lapangan, serta menunjukkan arah dan tujuan penelitian secara jelas.

Penelitian ini berangkat dari konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai landasan utama. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam UUD Pasal 33 1945. Dalam sistem ini, koperasi dipandang sebagai bangun usaha yang paling sesuai karena menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus pelaku utama kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, koperasi desa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks penelitian ini, sistem ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Pengelolaan koperasi dipahami sebagai serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan koperasi yang dilakukan secara partisipatif oleh pengurus, anggota, serta pihak-pihak terkait. Pengelolaan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial, moral, dan kelembagaan.

Pengelolaan koperasi dalam kerangka konseptual penelitian ini dipengaruhi oleh tiga aspek utama. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi. Peningkatan kapasitas SDM mencakup upaya penguatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus serta anggota koperasi dalam bidang manajemen, administrasi, dan akuntansi koperasi. Kapasitas SDM yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pengelolaan koperasi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kedua, penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan koperasi. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, keadilan musyawarah merupakan fondasi etis dalam menjalankan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membangun kepercayaan anggota, mencegah praktik pengelolaan yang tidak sehat, serta memastikan bahwa koperasi dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

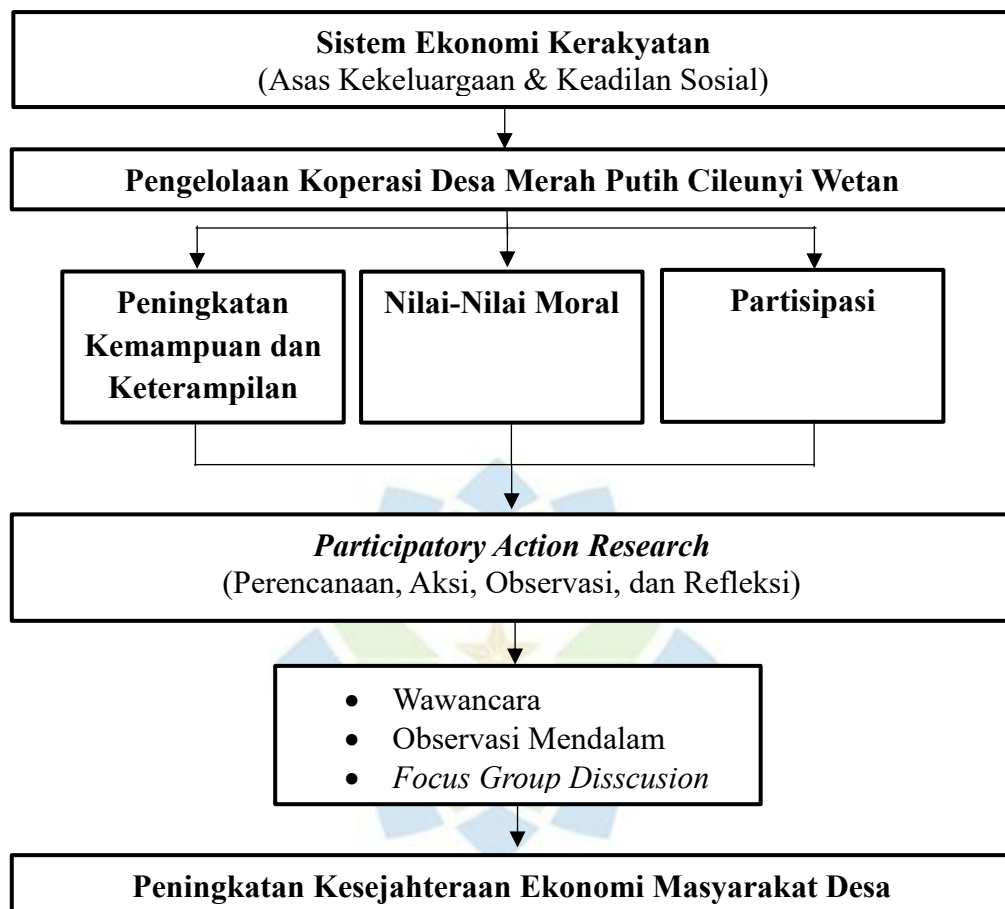
Ketiga, partisipasi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ekonomi koperasi. Partisipasi ini mencakup dukungan kebijakan dan regulasi dari

pemerintah desa, pendampingan teknis dan kelembagaan, serta kerja sama dan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha koperasi. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan swasta dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat akses koperasi terhadap sumber daya, permodalan, dan jejaring usaha.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan PAR menempatkan masyarakat, pengurus koperasi, dan pemerintah desa sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan aksi, observasi, hingga refleksi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan perbaikan praktik pengelolaan koperasi secara nyata.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian proses dalam kerangka konseptual ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Melalui pengelolaan koperasi yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, didukung oleh kapasitas SDM yang memadai, nilai moral yang kuat, serta partisipasi multipihak, koperasi diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cileunyi Wetan.

Jika dibuat skema, maka kerangka berpikir dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2.2.1.1 Kerangka Konseptual pada penelitian Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Sistem Koperasi Merah Putih (Participatory Action Research di Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung)

1.6 Langkah-langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Secara garis besar, pelaksanaan penelitian ini difokuskan di wilayah Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penetapan lokasi penelitian dilakukan melalui berbagai pertimbangan rasional yang didasarkan pada kesesuaian antara karakteristik wilayah dengan fokus dan tujuan penelitian, sehingga Desa

Cileunyi Wetan dinilai layak dan relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Beberapa pertimbangan utama yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan objek penelitian dan ketersediaan data. Desa Cileunyi Wetan dipilih karena menjadi lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah mengalami penguatan kelembagaan serta didukung ketersediaan data penelitian yang memadai.
- b. Adanya proses transformasi kelembagaan koperasi. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan berkembang dari koperasi yang telah ada sebelumnya, sehingga relevan untuk mengkaji proses transformasi kelembagaan berkelanjutan.
- c. Potensi replikasi model pengelolaan koperasi. Perkembangan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan yang relatif positif menjadikan desa ini potensial sebagai model percontohan bagi pengembangan koperasi desa di wilayah lain.

1.6.2 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang memandang realitas sosial tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui proses konstruksi makna yang berlangsung dalam interaksi sosial. Paradigma ini menekankan bahwa realitas dipahami sebagai hasil penafsiran individu dan kelompok berdasarkan pengalaman, nilai, serta konteks sosial yang melingkupinya. Dalam perspektif konstruktivisme, pengetahuan dan kebenaran sosial tidak diposisikan sebagai sesuatu yang mutlak, melainkan bersifat relatif,

dinamis, dan kontekstual, bergantung pada sudut pandang para aktor sosial yang terlibat dalam suatu realitas (Hanitzsch, 2001).

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, dan sarat makna. Fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui konteks, pengalaman, dan makna yang mereka bangun. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014).

Metode penelitian yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) menekankan keterlibatan aktif antara masyarakat dan pihak pendamping dalam proses perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi yang dilakukan secara berkelanjutan (Kemmis & McTaggart, 1988).

Tujuan dari *Participatory Action Research* (PAR) adalah menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif, dengan memfasilitasi terjadinya perubahan sosial yang nyata melalui pemberdayaan masyarakat. (McIntyre, 2008). Dengan demikian, *Participatory Action Research* (PAR) tidak bekerja seperti penelitian konvensional karena masyarakat tidak diposisikan hanya sebagai objek, tetapi sebagai objek yang terlibat aktif dalam seluruh proses penelitian.

Tahap *Participatory Action Research* (PAR) dalam penelitian ini dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berkelanjutan. Berikut tahapan *Participatory Action Research* (PAR):

- a. *To Know* (mengetahui kondisi riil komunitas). Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah proses-proses inkulturasi yaitu membaaur dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dengan pelaksanaan observasi dan wawancara mendalam untuk mencari Gambaran keadaan apadanya secara detail, menyeluruh dan mendalam.
- b. *To Understand* (memahami problem komunitas). Bertujuan untuk memahami persoalan utama komunitas ditempuh dengan analisis bersama melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD).
- c. *To Plann*(merencanakan pemecahan masalah komunitas). Perencanaan program harus didasarkan atas rumusan masalah dalam bentuk pohon masalah yang sudah disusun melalui proses FGD dalam tahap sebelumnya. Proses partisipasi komunitas harus terbangun secara murni, sehingga keterlibatan mereka dalam proses riset terbangun dengan baik.
- d. *To Act* (melakukan program aksi pemecahan masalah). Tahap ini merupakan tahap implementasi program dari yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Program aksi harus merupakan pemecahan problem sosial yang sudah dianalisis sejak tahap awal, oleh karena itu antara masalah dan pemecahan masalah harus linier.
- e. *To Change* (membangun kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan). Melakukan refleksi atas hasil proses selama proses riset dan pemberdayaan.

Refleksi bukan sekedar dilakukan untuk internal tim peneliti, tetapi dilakukan bersama komunitas, sehingga terbangun pembelajaran untuk keseluruhan masyarakat yang terlibat (Afandi, et al., 2022).

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data dalam bentuk narasi, hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen yang menggambarkan pengalaman, pandangan dan proses sosial masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui proses eksploratif dan deskriptif, bukan untuk menguji hipotesis melainkan membangun pemahaman kontekstual. (Creswell, 2014).

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian di lapangan. Melalui wawancara, observasi, dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta catatan lapangan (*Field Notes*).

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi bersumber dari dokumen, arsip, atau publikasi yang telah disusun oleh pihak lain. Seperti dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi, arsip dan catatan administratif, literatur, media dan dokumentasi lama. Dengan demikian, dalam penelitian ini

data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung analisis terhadap temuan data primer.

1.6.5 Penentuan Informan dan Unit Analisis

a. Informan dan Unit Analisis

Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan data yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih karena kualitas informasi, bukan jumlahnya (Tongco, 2007).

Unit analisis pada penelitian ini adalah Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan sebagai lembaga ekonomis berbasis desa serta masyarakat Desa Cileunyi Wetan sebagai subjek pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan *Participatory Action Research*.

b. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga diperlukan seleksi informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait objek penelitian.

Informan kunci ditetapkan berdasarkan kriteria utama, yaitu memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa atau kelembagaan masyarakat, memahami kondisi sosial dan kelembagaan ekonomi desa, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan maupun ketiadaan Koperasi Unit Desa (KUD), serta terlibat langsung

dalam proses pengambilan keputusan atau aktivitas yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, informan kunci dipilih dari individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai mengenai dinamika sosial-ekonomi Desa Cileunyi Wetan.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini ditetapkan Nurendi sebagai informan kunci utama. Penetapan ini dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai ketua koperasi serta terlibat langsung dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Posisi dan keterlibatan tersebut menjadikan informan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai latar belakang, tujuan, serta dinamika kelembagaan koperasi desa, sehingga sesuai dengan kualifikasi informan kunci dalam penelitian ini. Selanjutnya, informan pendukung ditentukan untuk melengkapi dan memperkaya data penelitian. Informan pendukung dipilih secara *purposive* dari pengurus bidang usaha, anggota koperasi, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan program koperasi desa. Pemilihan informan pendukung ini bertujuan untuk memperoleh data beragam dan memperkuat analisis penelitian.

Proses penentuan informan dilakukan secara bertahap hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan lagi data baru yang signifikan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan diharapkan mampu menggambarkan kondisi penelitian secara komprehensif dan mendalam.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah metode *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif peneliti bersama partisipan dalam setiap tahapan riset, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, hingga refleksi. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan data yang digunakan tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti wawancara atau dokumentasi, tetapi juga menuntut keterlibatan langsung peneliti sebagai bagian dari proses yang sedang diteliti.

a. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas koperasi, interaksi antar pengurus-anggota, serta dinamika sosial masyarakat. Observasi membantu peneliti memahami konteks nyata di lapangan, termasuk perilaku, praktik kerja, dan pola partisipasi masyarakat yang tidak selalu muncul dalam wawancara.

b. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, pengurus koperasi, serta pihak lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik terkait pengelolaan serta pemberdayaan ekonomi melalui koperasi.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan melibatkan pengurus dan anggota koperasi sebagai ruang diskusi kolektif untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Teknik ini berfungsi untuk menangkap perspektif bersama,

memperkuat partisipasi anggota, dan menghasilkan kesepakatan reflektif sebagai dasar perbaikan pada siklus *Participatory Action Research* (PAR) berikutnya.

d. Dokumentasi

Dokumen yang dikumpulkan meliputi AD/ART koperasi, laporan kegiatan, catatan rapat, kebijakan desa, foto kegiatan, serta data pendukung dari pemerintah desa atau lembaga terkait. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memvalidasi informasi dari wawancara dan observasi.

e. Catatan Lapangan

Catatan lapangan memuat seluruh temuan, refleksi, serta dinamika yang muncul selama proses penelitian. Catatan ini berfungsi sebagai data pendukung untuk menafsirkan hasil observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD) secara lebih komprehensif.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari sumber, teknik, dan waktu.

- a. Triangulasi. Triangulasi sumber: membandingkan informasi antara pengurus koperasi, anggota, pemerintah desa, dan dokumen resmi; Triangulasi teknik: menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan untuk memeriksa konsistensi temuan; Triangulasi waktu: pengumpulan data dilakukan pada waktu berbeda untuk melihat kestabilan informasi.
- b. *Member Cheking*. *Member cheking* dilakukan dengan mengembalikan hasil wawancara, temuan lapangan, dan interpretasi awal kepada informan untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran informasi. Teknik ini dilakukan pada

tahap refleksi setiap siklus *Participatory Action Research* (PAR), sehingga informan terlibat langsung dalam memvalidasi temuan.

- c. *Peer Debriefing*. *Peer Debriefing* dilakukan melalui diskusi berkala dengan dosen pembimbing atau pihak lain yang memahami konteks penelitian guna menguji ketepatan analisis, konsistensi logika temuan, serta memastikan bahwa proses interpretasi data dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- d. *Audit Trail*. *Audit trail* dilakukan dengan menyimpan catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi kegiatan, foto, dan notulen rapat *Participatory Action Research* (PAR). Semua jejak proses penelitian dicatat secara sistematis sehingga proses analisis dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.
- e. *Reflexivity*. Refleksivitas dilakukan melalui proses refleksi diri secara berkelanjutan untuk menyadari potensi bias selama pelaksanaan *Participatory Action Research* (PAR), khususnya karena adanya peran sebagai fasilitator dalam kegiatan penelitian. Upaya menjaga objektivitas dilakukan dengan memisahkan fungsi fasilitas dan analisis data, serta memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengembangan koperasi bersumber dari partisipan, bukan dari pihak fasilitator.

Melalui kombinasi teknik-teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip partisipatif yang menjadi dasar pendekatan PAR.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan.

a. Kondensasi Data

Tahap ini mencakup proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah dari wawancara, observasi, dokumentasi serta catatan lapangan. Kondensasi ini bertujuan menajamkan informasi sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai dinamika koperasi dan proses pemberdayaan.

b. Penyajian Data

Data yang sudah terkondensasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau bagan tematik untuk memudahkan pemahaman hubungan antar kategori. Penyajian data membantu untuk melihat pola, hubungan, dan temuan penting secara sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, dilakukan proses menarik temuan-temuan utama berdasarkan pola, kategori, atau tema yang muncul. Kesimpulan diverifikasi secara terus-menerus melalui triangulasi.